



**Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Republik Indonesia**

**Siaran Pers Nomor: 176/HUMAS PMK/X/2020**

**Edukasi Protokol Kesehatan Harus Berkesinambungan**

Jakarta (24/10) -- Efektivitas penerapan protokol kesehatan akan lebih optimal jika diimbangi dengan upaya sosialisasi dan edukasi. Hal itu harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga masyarakat akan patuh dan menjadikan prokes sebagai kebiasaan baru.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih mudah menerima pendekatan secara kultural, yakni melalui penyadaran.

"Seperti dalam teori pengadopsi baru, masyarakat ini harus diingatkan terus. Pendekatannya juga akan lebih efektif melalui penyadaran dengan memberikan edukasi, imbauan, nasehat, itu yang harus dikedepankan," ujarnya saat menjadi narasumber acara Setroom CNN Indonesia: Jurus 3M dari Sabang sampai Merauke yang ditayangkan melalui live streaming, Jumat (23/10) malam.

Kendati demikian, menurutnya, masyarakat juga tidak bisa diberikan pendekatan penyadaran secara paksa. Alih-alih membuat masyarakat sadar menjalankan protokol kesehatan, sebaliknya malah justru akan menolak jika dipaksa terus-menerus.

Oleh sebab itu, menurut Muhadjir, pemerintah terutama para pejabat publik dan tokoh masyarakat harus memberikan contoh yang dapat diikuti oleh khalayak. Di samping itu juga perlu dibarengi aksi nyata seperti membagi-bagikan masker gratis.

"Jadi sebenarnya kalau ada daerah yang memberikan sanksi itu boleh-boleh saja. Namun yang paling efektif, saya kira tetap kita harus terus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita atau yang istilahnya disebut new normal," pungkas Menko PMK.

Sementara itu, Pengamat Sosiologi UI Devi Rachmawati menyebut beberapa hal yang mestinya bisa dijadikan dasar atau pendekatan upaya agar masyarakat mau patuh melaksanakan prokes, yaitu diantaranya sosialisasi tiada henti.

"Kultur manusia di kita (Indonesia) itu mudah lupa sehingga sosialisasi ini harus terus menerus. Jangan mudah puas merasa sudah pernah ditayangkan dan masyarakat lihat lalu paham. Lihatnya aja ngga, apalagi paham," cetusnya.

Oleh sebab itu, tegas Devi, masyarakat perlu melihat contoh dan yang dinilai paling efektif ialah dari pejabat atau tokoh publik. Ironisnya, justru banyak diantara para tokoh itu yang malah abai terhadap prokes.

Di samping hal tersebut, ia pun mengatakan demonstrasi simbolik perlu untuk sekali lagi mengingatkan masyarakat bahwa Covid-19 itu ada dan bisa berdampak signifikan dalam kehidupan.

"Satu lagi yang juga mungkin kalau dirasa perlu oleh pemerintah yaitu isolasi. Mau tidak mau itu harus dilakukan kalau memang tiga hal tadi belum mampu mendorong kesadaran masyarakat," tandasnya.

(\*)

\*\*\*\*\*

**Bagian Humas dan Perpustakaan,  
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,  
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
roinfohumas@kemenkopmk.go.id  
www.kemenkopmk.go.id  
Twitter@kemenkopmk  
IG: kemenko\_pmk**